

Mayor KNIL Oerip Soemohardjo dan Sejarah Kebijakan Awal Pembentukan Tentara Nasional Indonesia

Endro Tri Sudarwono
FISIP
Universitas Peradaban Brebes
saniscara99midas@gmail.com

ABSTRAK

Oerip Soemohardjo diangkat menjadi letnan dua (KNIL) tanggal 24 Oktober 1914 dengan nomor *staamboek* 77352 termuat pada harian Sinar Djawa edisi 24 Oktober 1914, setelah sebelumnya lulus dari *Inlandsche Officiern School* Jakarta. Oerip tergolong perwira yang disegani oleh semua golongan semasa berdinasi di KNIL. Selama 24 tahun berdinasi di KNIL Oerip sebenarnya hampir berpangkat Letnan Kolonel sebelum pensiun. Pada tanggal 5 Oktober 1945 pasukan-pasukan BKR (Badan Keamanan Rakyat) dijadikan TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Untuk mengorganisasi TKR itulah Pemerintah, yang pada waktu itu masih berkedudukan di Jakarta, memanggil Pak Oerip, yang hidup sebagai pensiunan Mayor KNIL di dekat Yogyakarta. Pak Oerip memperoleh mandat dari Pemerintah sebagai Kepala Staf Umum untuk mengorganisir TKR. Letjen Oerip Soemohardjo pada tanggal 12 November 1945 memanggil semua Panglima Divisi dan resimen TKR untuk menghadiri sebuah rapat di Yogyakarta, yaitu tempat kedudukan baru Markas Besar TKR, setelah Jakarta diduduki oleh tentara Sekutu. Acara yang utama ialah pemilihan Panglima Besar. Konferensi dipimpin oleh Kepala Staf Umum Letjen Oerip Soemohardjo dan berjalan lancar, tetapi kemudian timbul suasana yang tegang ketika diumumkan mengenai suatu urgensi yang tidak dapat ditunda, terpaksa harus mengadakan tambahan agenda rapat, ialah menentukan/memilih calon-calon yang akan dipilih sebagai Pimpinan Tertinggi TKR.

Kata Kunci: BKR; KNIL; TNI; TRI

ABSTRACT

Oerip Soemohardjo was appointed second lieutenant (KNIL) on October 24, 1914 with the staamboek number 77352 contained in the Sinar Djawa daily edition of October 24, 1914, having previously graduated from the Jakarta Inlandsche Officiern School. Oerip was classified as an officer respected by all groups while serving in the KNIL. During 24 years of serving in the KNIL Oerip actually almost held the rank of Lieutenant Colonel before retiring. On October 5, 1945 BKR (People's Security Agency) forces were made TKR (People's Security Army). It was to organize the TKR that the Government, which at that time was still domiciled in Jakarta, summoned Mr. Oerip, who lived as a retired Major of KNIL near Yogyakarta. Pak Oerip obtained a mandate from the Government as the Chief of General Staff to organize TKR. Lt. Gen. Oerip Soemohardjo on 12 November 1945 summoned all Division Commander and TKR regiments to attend a meeting in Yogyakarta, the new seat of the TKR Headquarters, after Jakarta was occupied by Allied troops. The main event was the election of the Great Commander. The conference was chaired by the Chief of General Staff Lt. Gen. Oerip Soemohardjo and proceeded smoothly, but then a tense atmosphere

emerged when it was announced about an urgency that could not be postponed, forced to hold an additional meeting agenda, which was to determine / choose the candidates to be elected as the Supreme TKR Leaders.

Keywords: BKR; KNIL; TNI; TRI

PENDAHULUAN

Kebutuhan perwira KNIL diatasi pemerintah kolonial dengan membuka sebuah sekolah militer untuk mencetak perwira KNIL. Sejak 1852, di *Meester Cornelis* (Jatinegara) di Jakarta. Sekolah ini sebelumnya menerima pemuda yang memiliki pendidikan dasar modern entah ELS, HIS bahkan HBS. Seiring perkembangan persekolahan barat di Jawa, lama-lama minimal hanya lulusan MULO atau HBS III tahun yang bisa diterima dalam sekolah militer ini. Ketika Oerip yang masuk tahun 1910 aturan semacam itu belum ada, pada masa Oerip mendaftar banyak jebolan *Opleiding School voor Indische Artsen* (sekolah Pamongpraja yang biasa disingkat OSVIA) yang masuk, Oerip hanya sempat setahun di OSVIA Magelang.

Tanggal 24 Oktober 1914, tiga orang pemuda pribumi telah diangkat menjadi letnan dua (KNIL) setelah sebelumnya lulus dari

Inlandsche Officiern School Jakarta. Tiga perwira pribumi itu adalah Sugondo dengan nomor *staamboek* 77336, Oerip Soemohardjo dengan nomor *staamboek* 77352 dan Bagoes Soedjono dengan nomor *staamboek* 747840. Nama tiga orang pemuda itu termuat pada harian Sinar Djawa edisi 24 Oktober 1914. Masa itu jarang sekali pemuda Indonesia yang bisa menjadi perwira dalam jajaran korps perwira KNIL. Mereka umumnya berasal dari kalangan keluarga terpandang (Matanasi, 2011).

Oerip Soemohardjo bukanlah orang Indonesia dengan pangkat tertinggi dalam KNIL seperti yang banyak ditulis dalam buku-buku sejarah, terutama buku pelajaran sejarah di sekolah. Padahal, pangkat tertinggi yang pernah dicapai orang-orang pribumi yang berkarier di KNIL adalah letnan kolonel, walau sebagai perwira kesehatan saja. Bila ada yang berpangkat mayor jenderal, itu hanya

pangkat titular saja, tapi tidak ada yang mencapai jenderal penuh. Pangkat macam ini hanya yang disandang beberapa raja lokal di wilayah Hindia Belanda yang setia kepada Ratu Belanda. Hampir semua raja memiliki pangkat titular macam ini. Selain orang Belanda totok atau Indo dan pribumi ditubuh KNIL, setidaknya ada lagi perwira kesehatan dari orang-orang keturunan China (Matanasi, 2011).

Pangkat akhir Oerip adalah mayor dan hampir menduduki pangkat *Groot Mayor* yang hampir setara letnan kolonel. Setidaknya ada 3 pribumi berpangkat letnan kolonel dalam KNIL. Seorang di antaranya adalah dokter dari suku Manado. Oerip lulus dari sekolah perwira di *Meester Cornelis* itu pada tahun 1914, banyak tulisan menyebutkan Oerip masuk tahun 1910, ini sangat janggal dalam sekolah opsir pendidikan pribumi yang lamanya 3 tahun. Oerip sendiri mendaftar diam-diam masuk KNIL bersama Soegondo yang kelak menjadi Kolonel Tentara Republik zaman revolusi. Menurut pandangan kaum priyayi-seperti juga ayah Oerip-menjadi serdadu

kolonial adalah sesuatu yang hina pada masa itu. Kendali demikian sang ayah akhirnya mau mengerti jalan hidup Oerip-yang tidak pernah diduganya-karena dalam surat pada ayahnya Oerip kerap berkata bahwa dirinya akan lulus sebagai perwira KNIL bukan serdadu biasa. Menurut Oerip, perwira KNIL pribumi maupun Eropa sama-sama dihormati.

Di sekolah militer itu tentu saja dipelajari berbagai ilmu militer. Oerip termasuk beberapa mantan siswa OSVIA di Magelang yang masuk sekolah perwira militer di Batavia itu. Sebelum diterima sebagai kadet Oerip baru saja meninggalkan sekolahnya-dia tidak meneruskan pelajaran di kelas dua-dan diam-diam mendaftarkan diri sebagai calon kadet di sekolah Opsir di *Meester Cornelis*. Sebagai perwira KNIL tentu saja mereka dikirim ke penjuru Hindia, yang kadang terpercil sekali.

Setelah lulus dari sekolah perwira pribumi itu, Oerip ditempatkan di Banjarmasin. Sebagai orang yang terbiasa dengan petualangan, hal itu bukan masalah bagi seorang Oerip yang sering mendengar

cerita serdadu-serdau di Purworejo maupun Magelang. Oerip tergolong perwira yang disegani oleh semua golongan semasa berdinasi di KNIL. Selama 24 tahun berdinasi di KNIL Oerip sebenarnya hampir berpangkat Letnan Kolonel sebelum pensiun. Padahal saat itu hanya ada dua orang pribumi yang mencapai pangkat Letnan Kolonel KNIL ketika pensiun non tituler-kedua perwira yang dimaksud adalah Letnan Kolonel Kawilarang dan Letnan Kolonel Dr. HDJ Apituley. Kedua Letnan Kolonel itu adalah perwira kesehatan KNIL, bukan perwira pemegang komando pasukan yang biasa diturunkan dalam pertempuran. Oerip adalah perwira yang bertugas dalam pasukan yang kemungkinan diturunkan dalam pertempuran. Bila Oerip menjadi Letnan Kolonel non-tituler dan non-kesehatan, mungkin dialah perwira karier infantri pertama pribumi tertinggi sebelum Perang Dunia II dalam KNIL (Matanasi, 2011).

Ketika tentara Jepang mendarat Oerip ditawarkan di Cimahi. Sebelumnya dia sempat dipanggil kembali sebagai militer. Oerip,

seperti halnya banyak perwira KNIL lainnya menghindari kerjasama dengan Tentara Pendudukan Jepang. Tawaran kerjasama Tentara Jepang dengan mantan KNIL dibatasi pada sektor non-militer. Oerip Sumohardjo, setelah dibebaskan dari kamp interniran, pernah ditawarkan oleh seorang Kolonel Tentara Jepang untuk menjadi Kepala Polisi. Namun Oerip menolak tawaran itu dan memilih hidup menjadi orang sipil biasa di Kampung Gentan, utara kota Yogyakarta (Matanasi, 2011).

Pembentukan BKR berlangsung pada tanggal 23 Agustus 1945, karena RI sebagai negara baru harus didukung oleh kekuatan militer. Guna menghindari hantaman kekuatan luar yang lebih besar maka kekuatan militer itu hanya diberi nama Barisan Keamanan dengan pengertian yang lebih netral dan bertujuan menjaga keamanan. Akan tetapi, BKR yang dibantu semua laskar inilah yang harus menghadapi pasukan Sekutu dan KNIL. BKR tidak mempunyai badan pusat koordinasi, tetapi dibina oleh mantan KNIL setempat. Resminya pusat BKR ada di Jakarta tetapi tidak pernah berfungsi. Meskipun demikian

BKR sudah merupakan institusi yang merupakan korps pejuang bersenjata yang bersumber pada rakyat dan pemuda. Sekitar dua bulan kemudian dibentuklah TKR, yaitu tanggal 5 Oktober 1945, sebagai tentara reguler. Sementara itu masih terdapat barisan-barisan pemuda yang bersifat setengah organisasi politik, setengah organisasi militer. Barisan pemuda itulah yang menjadi kekuatan militernya partai-partai politik pada awal proklamasi. Dengan terbentuknya TRI pada tanggal 25 Januari 1946 yang merupakan pasukan reguler dan nasional maka barisan pemuda dan laskar itu dirasionalisasikan. Setelah terjadinya integrasi ke dalam pasukan reguler masih ada kesulitan psikologis, karena masih terikat dengan aliran politik yang mereka yakini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa bersenjata (Pranoto, 2001).

Pada tanggal 5 Oktober 1945 pasukan-pasukan BKR itu dijadikan TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Untuk mengorganisasi TKR itulah Pemerintah, yang pada waktu itu masih berkedudukan di Jakarta, memanggil Pak Urip, yang hidup sebagai pensiunan

Mayor KNIL di dekat Yogyakarta. Pak Urip memperoleh mandat dari Pemerintah sebagai Kepala Staf Umum untuk mengorganisir TKR. Pak Urip memilih Yogyakarta sebagai tempat untuk markasnya dan dia segera meninggalkan Jakarta. Bagaimana tidak teraturnya keadaan pada waktu itu dapat dibayangkan dari pemeriksaan yang lama yang harus dialami oleh Pak Urip, Kepala Staf Umum, dari pemuda-pemuda di stasiun Tegal, sebelum dia diperkenankan untuk meneruskan perjalanannya ke Yogyakarta (Simatupang, 1980).

Ketika pasukan Sekutu benar-benar mendarat dan bergerak ke pedalaman untuk melucuti garnisun-garnisun Jepang di sana dan untuk membebaskan tawanan perang pihak Sekutu, para perwira TKR mendesak pemerintah agar dengan segera dan secara permanen mengisi jabatan Panglima Tentara dan Menteri Keamanan (Pertahanan). Oleh karena pemerintah tidak menanggapi permintaan mereka itu, maka Oerip Soemohardjo pada tanggal 12 November memanggil semua panglima divisi dan resimen

TKR untuk menghadiri sebuah rapat di Yogyakarta, tempat kedudukan baru Markas Besar TKR setelah Jakarta diduduki oleh tentara Sekutu. Pokok pembicaraan yang utama adalah soal mengisi jabatan pimpinan di Markas Besar TKR dan dalam Kementerian Keamanan. Dalam rapat itu, Sudirman, seorang bekas opsir PETA terpilih sebagai Panglima TKR (Sundhaessen, 1986).

Adanya Tentara Republik Indonesia (TRI) sebagai tentara reguler dan badan perjuangan sebagai kekuatan rakyat, sangat tidak menguntungkan perjuangan, karena badan-badan perjuangan dan laskar-laskar memiliki haluan politik sesuai dengan partai tempat ia bernaung. (Djamaluddin, 1998hal 23). Sehingga Pemerintah pada waktu itu melakukan penyempurnan-penyempurnaan terhadap TRI yang pada akhirnya melahirkan Tentara Nasional Indonesia yang sekarang. Lahirnya TNI tidak bisa dilepaskan dari tokoh ex tentara KNIL Mayor Oerip Soemohardjo.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sejarah didefinisikan sebagai suatu kumpulan yang sistematis dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang dimaksudkan untuk membantu dengan secara efektif dalam pengumpulan bahan-bahan sumber dari sejarah, dalam menilai atau menguji sumber-sumber itu secara kritis, dan menyajikan suatu hasil “*sinthese*” (pada umumnya dalam bentuk tertulis) dari hasil-hasil yang dicapai (Wasino & Endah Sri Hartatik, 2018).

Dari pengertian tersebut, penelitian ini menetapkan adanya tiga langkah atau tahap kegiatan di dalam metode sejarah, ialah:

1. Pencarian bahan-bahan sumber di atas kita dapat bekerja, ialah pencarian sumber-sumber keterangan atau pencarian bukti-bukti sejarah, tahap ini disebut Heuristik, yang merupakan langkah permulaan di dalam semua penulisan sejarah.
2. Penilaian atau pengujian terhadap bahan-bahan sumber tersebut dari sudut pandangan nilai kenyataan (kebenarannya) semata-mata, tahap kedua ini disebut kritik sumber atau kritisisme, yang merupakan langkah yang

sangat penting sehingga sering dikatakan bahwa seluruh proses dari metode sejarah disebut sebagai Kritisisme Sejarah.

3. Penceritaan atau Penyajian yang bersifat formal (resmi) dari penemuan-penemuan dari kegiatan Heuristik dan Kritisisme; tahap ketiga ini meliputi penyusunan kumpulan dari data sejarah dan penyajian /penceritaannya (pada umumnya dalam bentuk tertulis) di dalam batas-batas kebenaran yang objektif dan arti atau maknanya; tahap ketiga ini disebut *Sinthese* dan Penyajian (*Sinthese* dan Penulisan).

PEMBAHASAN

Pada tanggal 22 Agustus 1945 keluar pengumuman dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tentang pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Badan ini bukanlah suatu tentara melainkan hanya merupakan suatu badan atau Korps Pejuang Bersenjata dengan tugas untuk menjaga ketentraman umum (Hartono, 2012). Organisasi BKR saat itu belum merupakan suatu organisasi yang tertata dengan baik

dalam bentuk maupun susunannya. Susunan persenjataan, kekuatan, peralatan maupun pimpinannya masih campur baur. Susunan organisasi merupakan campuran yang terdiri dari bermacam-macam organisasi militer seperti Heiho, Peta, Gyugun, KNIL, serta organisasi semimiliter, organisasi laskar pejuang.

Pada saat barisan-barisan pemuda bersenjata sedang melucuti Jepang di berbagai daerah, pula pada saat pertempuran-pertempuran melawan NICA sudah terjadi di kota-kota besar, pula pada saat pasukan-pasukan Sekutu yang pertama mendarat dan memerintahkan Jepang untuk membatalkan Republik dan mempertahankan inventaris Indonesia maka pemerintah memanggil bekas Mayor KNIL Urip Sumohardjo ke Jakarta, di mana ia menerima pengangkatannya dari tangan Wakil Presiden Hatta menjadi kepala staf umum dan ditugaskan untuk membentuk tentara. Mari kita ikuti maklumat-maklumat resmi yang mengantar kelahiran TKR. (Nasution, 1970).

Maklumat Pemerintah

Untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan satu Tentara Keamanan Rakyat.

Jakarta, 5 Oktober 1945
Presiden Republik Indonesia
Sukarno

Demikianlah, pada tanggal 5 oktober 1945 BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Sesuai dengan namanya, fungsi utama TKR masih tetap memelihara keamanan dalam negeri dan bukan menghadapi musuh dari luar. Namun demikian setidaknya statusnya sudah ditingkatkan menjadi tentara. Dengan menggunakan nama baru itu, dari segi struktur ia mengalami perbaikan. Untuk sebagian besar hal itu dimungkinkan berkat adanya perwira-perwira didikan Belanda yang masuk BKR. Sementara para bekas opsir PETA tak pernah mendapat pendidikan staf, para bekas opsir KNIL itu setidaknya telah berpengalaman sekedarnya dalam melakukan tugas-tugas staf dan oleh sebab itu mereka lebih memenuhi persyaratan untuk tugas yang berkaitan dengan pengorganisasian dan perencanaan militer.

Di antara kelimabelas orang Indonesia dalam KNIL dengan pangkat letnan muda ke

atas yang masih bertugas aktif dalam tahun 1942, tiga belas orang memutuskan untuk mendukung Republik. Mereka beranggapan bahwa dengan menyerahnya KNIL dalam 1942, mereka sudah dibebaskan dari kewajiban terhadap Mahkota Belanda. Sekelompok opsir KNIL lainnya, yang dapat dibedakan dengan kelompok yang pertama, yakni mereka yang lulus dari Sekolah Kadet Militer di Bandung dan dikenal sebagai “kadet-kadet Bandung” lebih bergairah lagi untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Republik (Sundhaussen, 1986).

Ketika pembentukan TKR diumumkan, pada hari itu juga bekar Mayor KNIL Oerip Soemohardjo, yang telah dipensiun dalam tahun 1938, diangkat sebagai Kepala Markas Besar Umum TKR. Karena di kalangan orang-orang bekas PETA, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah, terdapat perasaan tidak senang terhadap bekas opsir KNIL, maka ia tidak diangkat menjadi Panglima Tentara, jabatan yang pada hari berikutnya diberikan kepada Suprijadi, pemimpin legendaris dan pemberontakan

PETA di Blitar. Tetapi pengangkatan itu hanya simbolis, karena sejak pemberontakan dalam bulan Februari itu Suprijadi tak pernah terlihat lagi. Pada tingkat kabinet, seorang Menteri ad interim untuk Kemanan Nasional diangkat pada tanggal 20 Oktober (Sundhaussen, 1986).

Di lapangan, dibentuk empat Komandemen, di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kepada mereka diberikan komando taktis, baik atas kesatuan-kesatuan TKR yang reguler, maupun atas sekian banyaknya badan perjuangan, yakni nama baru yang diberikan kepada berbagai organisasi kelasykaran. Batalion-batalion TKR dikelompok-kelompokkan menjadi resimen dan divisi. Enam divisi terbentuk di Sumatera, tiga di Jawa Barat, empat di Jawa Tengah, dan tiga di Jawa Timur (Sundhaussen, 1986).

Maklumat Pemerintah
Sebagai Menteri Keamanan Rakyat diangkat :
Suprijadi

Jakarta, 6 oktober 1945
Presiden Republik Indonesia
Sukarno

Pengumuman Pemerintah
Ini hari telah dilakukan pembentukan Tentara Kebangsaan di salah satu daerah dekat Jakarta

dengan maksud untuk menyempurnakan kekuatan Republik Indonesia.

Pemuda-pemuda, bekas Peta, Heiho, Kaigun-Heiho, dan pemuda-pemuda dari Barisan Pelopor telah menyiapkan tenaganya, agar setiap waktu dapat membaktikan tenaganya untuk menentang kembalinya penjajahan Belanda.

Pemuda-pemuda yang masuk Tentara Kebangsaan itu dengan segera diperengkapi dengan persenjataan, agar dengan jalan demikian dapat mempertahankan keamanan umum

Jakarta, 7 oktober 1945.

Mobilisasi Tentara Keamanan Rakyat
Untuk menjaga keamanan rakyat pada dewasa ini oleh Presiden Republik Indonesia telah diperintahkan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat. Tentara ini terdiri atas rakyat Indonesia yang berperasaan penuh tanggung jawab atas keamanan masyarakat Indonesia dan guna menjaga kehormatan negara Republik Indonesia.

Pemuda-dll nya yang tegap sentorasa badan dan jiwanya, bekas prajurit Peta, prajurit Hindia Belandan dan Heiho, Kaigun-Heiho, Barisan Pemuda, Hisbullah, Pelopor dll, baik yang sudah maupun yang belum pernah memperoleh latihan militer, supaya selekas-lekasnya mendaftarkan diri pada kantor BKR di ibukota kabupaten masing-masing atau pada badan lain-lainnya yang ditunjuk oleh residen (kepala daerah) atau wakilnya.

Merdeka !

Jakarta, 9 Oktober 1945
Komite Nasional Pusat
Ketua

Mr. Kasman Singodimedjo

Pada tanggal 5 Oktober 1945,
Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat Pembentukan Tentara Kebangsaan yang diberi nama Tentara Keamanan Rakyat

(TKR). Maklumat pemerintah tersebut ditindaklanjuti oleh Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), Kasman Singodimejo dengan mengeluarkan seruan Mobilisasi TKR pada tanggal 9 Oktober 1945.

Pembentukan TKR mendapat sambutan hangat dari seluruh lapisan masyarakat. Beratus-ratus pemuda terdiri dari pelajar, pedagang, pegawai, dan lain lain berduyun-duyun mendaftarkan diri, meninggalkan pekerjaannya untuk menyumbangkan jiwa raga bagi pembelaan tanah air.

Pada tanggal 20 Oktober 1945, Pemerintah RI mengangkat Supriyadi (tokoh pemberontakan Peta di Blitar) sebagai pimpinan tertinggi TKR dan mantan Mayor KNIL Urip Sumohardjo sebagai Kepala Staf Umum TKR. Sejak saat itu disusunlah Markas Besar Umum (MBU) TKR yang merupakan bagian dari markas Tertinggi (MT) TKR (Hartono, 2012).

MT TKR meliputi empat komandemen, yakni Komandemen I Jawa Barat, Komandemen II Jawa Tengah,

Komandemen III Jawa Timur, dan Komandemen Sumatera (Hartono, 2012).

Kemudian pada tanggal 20 Oktober 1945 diumumkan :

Kementerian Keamanan Rakyat
Talah diangkat oleh pemerintah Republik Indonesia pucuk pimpinan Kementerian Keamanan Rakyat, ialah sebagai berikut :

1. Menteri ad Interim : Muhamad Suljoedikusumo
 2. Pemimpin Tertinggi : Suprijadi
 3. Kepala Staf Umum : Major Urip Sumohardjo.
- Selain itu bekas opsir-opsir tentara Hindia Belanda menyatakan sikapnya di belakang pemerintah Republik. Bahwa keinsyafan wajib ikut mempertahankan Republik Indonesia merdeka sudah juga meresap di hati sanubari segenap bekas opsir Indonesia dari tentara Belanda dahulu, dapat dinyatakan dalam maklumat mereka sbb. Ini

Jakarta, 14 Oktober 1945

Maklumat.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, semua bekas opsir-opsir tentara Hindia Belanda dahulu.

Menimbang:

- a. Bahwa menurut bunyinya proklamasi yang disebarkan dengan perantaraan radio pada tanggal 9 Maret 1942 dari panglima tentara Hindia-Belanda dahulu Letnan Djenderal Ter Poorten, tentara tersebut telah dibubarkan.
- b. Bahwa dengan sendirinya kami telah terbebas dari sumpah, yang kami pernah berikan pada waktu diangkat menjadi opsir.
- c. Bahwa ternyata NICA dengan pembantu-pembantunya telah menimbulkan kerusuhan-kerusuhan yang sangat menggusarkan hati kami sebagai manusia dan warga Indonesia.
- d. Bahwa menurut keyakinan kami yang sedalam-dalamnya, gerakan Republik Indonesia adalah gerakan yang sesuai dengan kehendak seluruh bangsa Indonesia dan bukan keinginan dari satu golongan atau lapisan saja.

e. Bahwa menurut dasar Republik Indonesia kita hendak hidup damai dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini.

Memutuskan :

1. Menyatakan, bahwa kami sekalian berdiri di belakang Republik Indonesia.
2. Menyatakan, bahwa kami sekalian siap sedia menerima segala perintah-perintah itu dengan segala kekuatan kami lahir dan batin.

Mosi ini disampaikan kepada :

1. Republik Indonesia
2. Komite Nasional Pusat
3. Umum. (Nasution, 1970)

Di kalangan pucuk Pimpinan TKR daerah dirasakan adanya satu kekurangan, yaitu Soepriyadi sebagai Pimpinan Tertinggi TKR yang ditunjuk oleh Presiden, tetapi tidak pernah muncul. Atas dasar itu, ada keinginan kuat di kalangan Pimpinan Markas Tinggi TKR untuk memilih dan mengangkat seorang Perwira Tinggi guna menggantikan Soepriyadi. Pimpinan Tertinggi yang baru benar-benar di rasakan perlu, mengingat kehadiran dan tenaganya dibutuhkan sekali untuk mengayomi ataupun mengatur seluruh kesatuan bersenjata, khususnya TKR yang baru dibentuk itu (Tjokropranolo, 1992).

TKR lahir dan didirikan dimana-mana, lebih-lebih setelah adanya perintah 1 November 1945, maka berdirinya laskar rakyat

di daerah-daerah semakin menjamur. Para komandan setempat kebanyakan dipilih langsung oleh bawahannya, atau oleh Komite Nasional Daerah setempat, atau juga oleh panitia yang sengaja dibentuk untuk maksud itu. Bahkan tidak jarang peroranganpun menyusun sendiri suatu pasukan dan ia menjadi komandannya.

Berdasarkan atas pertimbangan itu, pada tanggal 12 November 1945 di MTTKR (Markas Tinggi Tentara Keamanan Rakyat) di Gondokusuman, Yogyakarta, diadakan Konferensi Besar TKR yang dihadiri oleh hampir semua Komandan Divisi dan Resimen TKR. Juga hadir dalam rapat tersebut Sri Sultan Hamengkubowono IX, Sunan Pakubowono XII dan Mangkunegoro X. Utusan dari Sumatera yang hadir hanya seorang, yaitu Kolonel Moh. Noeh mewakili 6 Divisi di Sumatera, sedangkan wakil dari Jawa Timur juga tidak hadir lengkap karena sedang menghadapi keadaan genting sebagai akibat peristiwa 10 November. Acara pokok konferensi seperti yang telah diketahui oleh para hadirin sebelumnya ialah pembahasan

soal : “membangun tentara yang kuat guna menghadapi serangan musuh”. Konferensi ini dinilai sangat penting sebagai langkah pertama untuk mengatur ketertiban dan ketentraman negara Republik Indonesia. Pada saat itu baru mempunyai MT (Markas Tertinggi) TKR dengan pimpinan Kepala Staf Umum. Belum mempunyai Kementerian Pertahanan dan juga belum mempunyai seorang Panglima Besar. Jadi bahwa terbentuknya tentara nasional Indonesia adalah dari bawah ke atas, bukan seperti lazimnya: dari atas ke bawah. Pembentukan ini berlangsung secara demokratis dan dengan penuh kesetiakawanan (Tjokropranolo, 1992).

Ketika pasukan Sekutu benar-benar mendarat dan bergerak ke daerah pedalaman untuk melucuti garnisun-garnisun Jepang dan membebaskan semua tawanan perang Jepang, para perwira TKR mendesak pemerintah agar segera secara permanen mengisi jabatan Panglima Tentara dan Menteri Keamanan (Pertahanan). Oleh karena itu pemerintah tidak menanggapi permintaan mereka itu, maka Letjen Oerip Soemohardjo pada tanggal 12

November 1945 memanggil semua Panglima Divisi dan resimen TKR untuk menghadiri sebuah rapat di Yogyakarta, yaitu tempat kedudukan baru Markas Besar TKR, setelah Jakarta diduduki oleh tentara Sekutu. Pada waktu itu para Panglima Daerah ini bukanlah diangkat oleh pemerintah pusat dan sebagian besar lainnya adalah dasar kedaulatan (dipilih anak buah sendiri). Termasuk pula pangkat-pangkat dan kedudukan para perwira, semuanya berdasarkan kedudukan mereka dalam pasukannya atau karena pangkat-pangkat itu dipandang dari tingkat dan posisinya di masyarakat waktu itu. Konferensi dipimpin oleh Kepala Staf Umum Letjen Oerip Soemohardjo dan berjalan lancar, tetapi kemudian timbul suasana yang tegang ketika diumumkan mengenai suatu urgensi yang tidak dapat ditunda, terpaksa harus mengadakan tambahan agenda rapat, ialah menentukan/memilih calon-calon yang akan dipilih sebagai Pimpinan Tertinggi TKR (Tjokropranolo, 1992).

Perwira tertua dari Markas Tertinggi, panglima-panglima divisi dan komandan-

komandan resimen dari seluruh Jawa dan beberapa perwira yang menurut keterangan mereka mewakili tentara di Sumatra pada waktu itu berkumpul di ruang sidang dari Markas Tertinggi. Sri Sultan dan Sri Pakualam yang kedua-duanya telah diangkat sebagai perwira-perwira kehormatan, hadir juga. Acara yang utama ialah pemilihan Panglima Besar. Oleh karena Panglima Besar Suprijadi tidak muncul-muncul, maka telah timbul keinginan di kalangan yang luas dalam tentara, agar diangkat seorang Panglima Besar yang dengan sungguh-sungguh dapat memberikan pimpinan kepada tentara. Setelah diadakan beberapa kali pemungutan suara ulangan dan setelah diadakah istirahat untuk mendinginkan sedikit suasana yang sewaktu-saktu telah menjadi hangat, maka pada akhirnya dinyatakanlah Pak Dirman terpilih sebagai Panglima Besar. Sedangkan Pak Urip dinyatakan terpilih sebagai Kepala Staf Umum (Simatupang, 1980).

Selain sebagian besar perwira PETA/Gyugun, hadir pula beberapa mantan KNIL seperti Didi Kartasasmita, Jatikusumo

(KNIL + PETA) Gatot Soebroto (KNIL+PETA), Suryadarma dan Kastaf Oerip Soemohardjo sendiri. Para mantan KNIL yang telah masuk BKR/TKR itu telah terbukti turut berjuang dengan sepenuh hati mengabdikan diri kepada Tanah Air Indonesia dan merasa tidak terikat lagi dengan sumpah mereka untuk tetap setia pada Mahkota Belanda (Tjokropranolo, 1992).

Dengan terus mengalirnya pasukan Belanda yang membonceng tentara Inggris, Republik mengambil sikap yang secara simbolis lebih militan. Tanggal 1 Januari 1946 Kementerian Keamanan diubah namanya menjadi Kementeria Pertahanan, suatu isyarat yang jelas bahwa kementerian itu sekarang mendapat tanggung jawab yang lebih luas. Dalam waktu yang bersamaan Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Tapi nama ini pun masih belum memuaskan dan pada tanggal 24 Januari, TKR diberi nama baru sebagai Tentara Republik Indonesia (TRI). Selain itu dibentuk pula sebuah Panitia Besar untuk Reorganisasi Tentara dengan Letjen Oerip

Soemohardjo sebagai ketuanya, dengan tugas mencari jalan untuk meningkatkan efisiensi tentara (Sundhaessen, 1986).

Dalam usaha untuk menjadikan TKR sebagai alat Negara Republik Indonesia yang patuh kepada pemerintah, maka pada tanggal 25 Januari 1946 dikeluarkan Maklumat Pemerintah yang mengubah nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Ditetapkan bahwa TRI adalah satu-satunya organisasi militer di negara Republik Indonesia dan akan disusun atas dasar militer internasional. Kemudian pada tanggal 23 Februari 1946 dibentuklah Panitia Besar Penyelenggaraan Organisasi Tentara yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Urip Sumohardjo. Sebagai hasil reorganisasi maka susunan dan kewenangan Markas Tertinggi Tentara Keselamatan Rakyat Tentara Republik Indonesia (MTTKR/TRI) dipecah menjadi dua, yakni Markas Besar Umum (MBU) di bawah Panglima Besar Sudirman dengan tugas operasional membawahkan divisi-divisi dan Bagian-militer Kementerian Pertahanan di bawah

Direktorat Jenderal Administrasi dipimpin oleh Jenderal Mayor Soedibyo. Ada pun kebijaksanaan-kebijaksanaan Menteri Pertahanan dirasakan sebagai usaha untuk menguasai dan mengendalikan TRI. (Soebijono et all, 1992).

Panitia ini didominasi bekas opsir KNIL yang reputasinya sebagai ahli organisasi pada umumnya diakui pemerintah, dan bahkan oleh orang-orang bekas opsir PETA sekalipun. Pada tanggal 17 Mei panitia itu menyampaikan hasil kerjanya kepada kabinet, di mana mereka merekomendasikan suatu reorganisasi dari Kementerian Pertahanan dan Markas Besar Tentara. Berdasarkan usul reorganisasi itu, kementerian Pertahanan akan memperoleh kedudukan yang cukup kuat dengan mendapat fungsi-fungsi yang biasanya dilakukan oleh Markas Besar Tentara. Cara kerja panitia itu juga telah membuktikan bahwa orang seperti Oerip hampir-hampir tak dapat digantikan dalam tentara, sehingga pemerintah lalu mengangkatnya kembali sebagai Kepala Staf Tentara (Sundhaessen, 1986).

Rapat Tentara yang kedua diadakan pada tanggal 23 Mei dan dihadiri oleh para perwira Markas Besar dan semua panglima divisi dan resimen. Rapat menerima usul-usul reorganisasi yang diajukan Oerip dan menyambut baik pengangkatannya kembali sebagai Kepala Staf. Rapat memutuskan untuk menghapuskan komandemen-komandemen, yang bagaimanapun tidak berfungsi, kecuali di Jawa Barat. Satu tugas yang sulit adalah menghapuskan kesatuan-kesatuan siluman yang hanya ada di atas kertas, karena memimpin kesatuan-kesatuan itu, dengan sendirinya menolak untuk membubarkan diri atau bergabung dengan kesatuan lain. Tetapi pada umumnya rapat berhasil mengurangi jumlah divisi serta resimen dan menciptakan kesatuan-kesatuan dengan perbandingan yang lebih baik antara jumlah personel dan jumlah senjata (Sundhaessen, 1986).

Pemerintah menyempurnakan tentara kebangsaan secara terus-menerus dengan berbagai upaya, seraya bertempur dan berjuang bagi tegaknya kedaulatan serta kemerdekaan bangsa. Adanya dua pasukan

bersenjata yaitu TRI sebagai tentara reguler dan badan perjuangan sebagai kekuatan bersenjata rakyat, kurang menguntungkan perjuangan. Badan-badan perjuangan mempunyai haluan yang sesuai dengan partai politik tempat organisasi itu bernaung. Antara kekuatan bersenjata itu sering terjadi kesalahpahaman. Hal itu tentu saja tidak menguntungkan perjuangan (Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Pusat Sejarah, 2014).

Menghadapi situasi yang demikian, pemerintah tetap berupaya menyatukan Tentara Republik Indonesia (TRI) dengan badan-badan perjuangan dalam satu wadah. Pada tanggal 15 Mei 1947, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan penetapan tentang penyatuan TRI dengan laskas-laskar menjadi satu organisasi tentara. Penyatuan itu direalisasikan dengan membentuk panitia yang dipimpin langsung oleh Presiden, dibantu oleh Wakil Presiden Moh. Hatta, Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin, dan Panglima Besar Jenderal Soedirman. Anggota panitia terdiri atas Kepala Staf Umum Markas Besar

Tentara (MBT), Oerip Sumohardjo, Kepala Staf TRI Angkatan Udara Komodor Surjadarma. Selain itu, terdapat pula pimpinan bebarapa laskar atau badan perjuangan, pimpinan TRI Pelajar, Direktur Jenderal Angkatan Darat, dan Direktur Jenderal Angkatan Laut.

Untuk mempersatukan TRI dan laskar-laskar ke dalam satu organisasi tentara nasional, dikeluarkan Penetapan Presiden tanggal 5 Mei 1947 dan dibentuklah sebuah panitia yang langsung di bawah koordinir Presiden. Namun, pelaksanaan tugas panitia kurang lancar, lalu Menteri Pertahanan menyodorkan konsepsi pelaksanaan secara bertahap. Konsepsi itu disetujui dan pada tanggal 7 Juni 1947, Presiden Soekarno dengan Ketetapan Presiden No.24 tahun 1947, yang isinya antara lain, mulai tanggal 3 Juni 1947 disahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan menyatakan bahwa semua laskar dan badan perjuangan secara serentak dimasukkan ke dalam TNI. Sejak itu berdirilah TNI dengan pimpinan Panglima Besar Jenderal Soedirman yang didampingi

Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo. Secara resmi diumumkan pada hari Angkatan Bersenjata RI, 5 Oktober 1947 (Djamaluddin, 1998).

Partai-partai atau golongan-golongan politik yang membawahi laskar-laskar tidak rela menyerahkan pasukannya begitu saja kepada pemerintah, sehingga mempersulit kelancaran penyatuan TRI, apalagi, laskar-laskar tersebut menjadi pelopor ideologi yang dianutnya dan turut aktif dalam pergolakan politik. Oleh sebab itu, untuk mengatasi hal itu diperlukan pribadi-pribadi nonpartai, yaitu : Presiden, Wakil Presiden, dan Panglima Besar yang pada umumnya didukung oleh semua aliran dalam Republik Indonesia. Apa yang tidak mungkin dicapai melalui tata negara, ternyata dapat diselesaikan oleh pribadi-pribadi tersebut. Menteri Pertahanan kemudian menyodorkan konsepsi pelaksanaan penyatuan secara bertahap. Pada tahap pertama, laskar dalam daerah divisi diperbolehkan mempunyai satu resimen dari masing-masing partai politik. Resimen-resimen itu kemudian digabungkan menjadi satu brigade laskar. Pada tahap kedua,

brigade laskar menggabungkan diri kepada TRI, kemudian dilebur menjadi TNI (Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Pusat Sejarah, 2014).

Proses penggabungan bertahap ini disetujui oleh badan kelaskaran. Setelah panitia bekerja beberapa minggu akhirnya tercapai kesepakatan bahwa TNI akan dipimpin secara bersama (kolektif) dalam wadah Pucuk Pimpinan TNI. Pada tanggal 7 juni 1947 Presiden RI mengeluarkan Penetapan Presiden yang menyatakan bahwa mulai tanggal 3 Juni 1947 disahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI). TNI merupakan gabungan dari TRI dan laskar bersenjata, baik yang sudah atau tidak tergabung dalam Biro perjuangan. Penetapan ini juga menyatakan susunan pimpinan tertinggi TNI :

Pucuk pimpinan ; Panglima Besar Angkatan Perang Jenderal Soedirman diangkat sebagai Kepala Pucuk Pimpinan TNI. Anggota-anggotanya adalah Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo, Laksamana Muda Nazir, Komodor Suryadarma, Jenderal Mayor

Sutomo, Jenderal Mayor Ir. Sakirman, dan Jenderal Mayor Joyosuyono.

Ketetapan itu menyatakan bahwa :

Tentara Nasional Indonesia menjalankan tugas kewajiban mengenai siasat dan organisasi, selama proses penyempurnaan Tentara Nasional Indonesia sedang berjalan.

Semua satuan Angkatan Perang dan satuan laskar yang menjelama menjadi TNI, diwajibkan taat tunduk pada segala perintah dan instruksi yang dikeluarkan oleh Pucuk Pimpinan TNI. (Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Pusat Sejarah, 2014).

KESIMPULAN

Di sekitar lahirnya Tentara Nasional Indonesia yang tidak bisa dilepaskan dari sosok Oerip Soemohardjo, dapat disimpulkan bahwa ada tiga wadah yang ikut membentuk dan membidangi lahirnya TNI. Pertama, militer yang berasal dari kelompok kelaskaran seperti Hizbullah, Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia), Pemuda Rakyat, dan sebagainya. Mereka relatif kurang terdidik, kurang profesional karena masuk atau terlibatnya mereka dalam kegiatan militer didorong spontanitas untuk membantu perjuangan kemerdekaan. Pemerintah merekrutnya karena diperlukan untuk menghadapi perjuangan

fisik, selain itu sudah tentu untuk menghargai jasa-jasa mereka.

Kedua, mereka yang berasal atau mendapatkan pendidikan militernya di Peta. Pada dasarnya mereka sangat ahli dalam kegiatan lapangan. Ketiga, mereka yang memperoleh pendidikan militer dari Belanda. Baik KMA BREDA (Akademi Militer Kerajaan Belanda) maupun CORO (*Corps Opleming voor Reserve Officieren*) di Bandung, dan mereka yang memulai karier sebagai prajurit atau bintanga KNIL.

DAFTAR PUSTAKA

Djamaluddin, Dasman. 1998. Jenderal TNI Anumerta Basoeeki Rachmat dan Supersemar. Jakarta: Grasindo.

Hartoto, Edi. 2012. Panglima Bambang Sugeng: Panglima Komando Pertempuran Merebut Ibu Kota Djogja Kembali 1949 dan Seorang Diplomat. Jakarta: Kompas.

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Pusat Sejarah. 2014. Sejarah Organisasi TNI 1945-1965. Jakarta.

Matanasi, Petrik. 2011. Sejarah Tentara: Munculnya Bibit-bibit Militer di Indonesia Masa Hindia Belanda sampai Awal Kemerdekaan Indonesia. Yogyakarta: Narasi.

Nasution, A.H. 1970. Tentara Nasional Indonesia. Jakarta: Seruling Masa.

Pranoto, Suhartono W. 2001. Revolusi Agustus: Nasionalisme Terpasung dan Diplomasi Internasional. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.

Santosa, Iwan dan Wenri Wanhar. 2012. Pasukan-M Menang Tak Dibilang Gugur Tak Dikenang: Pertempuran Laut Pertama dalam Sejarah RI. Jakarta: Red & White Publishing.

Simatupang, T.B. 1980. Laporan Dari Banaran : Kisah Pengalaman Seorang Prajurit Selama Perang Kemerdekaan. Jakarta: Sinar Harapan.

Soebijono, A.S.S. Tambunan, Hidayat Mukmin, Roekmini Koesoemo Astoeti. 1992. Dwifungsi ABRI: Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Sundhaussen, Ulf. 1986. Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI. Jakarta: LP3ES..

Tjokropranolo. 1992. Panglima Besar TNI Jenderal Soedirman: Pemimpin Pendobrak Terakhir Penjajahan di Indonesia. Jakarta: Surya Persindo Divisi Penerbitan.

Wasino dan Endah Sri Hartatik. 2018. Metode Penelitian Sejarah: dari Riset hingga Penulisan. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.